

Judul : Revisi UU Pemilu, Komisi II serius bahas ambang batas parlemen
Tanggal : Minggu, 01 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Revisi UU Pemilu

Komisi II Serius Bahas Ambang Batas Parlemen

ANGGOTA Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai usulan penghapusan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*/PT) akan memperbanyak jumlah partai di parlemen. Kondisi itu berpotensi menghambat upaya penyederhanaan sistem kepartaian dalam Pemilu 2029.

Menurut Khozin, penghapusan PT justru akan mendorong lahirnya sistem multipartai yang tidak sederhana, karena jumlah partai di parlemen dipastikan semakin banyak. Akibatnya, fragmentasi politik di parlemen berpotensi semakin kuat dan menyulitkan proses pengambilan keputusan.

"Tapi sebagai usulan ya sah-sah saja, nanti menambah diskusi dalam pembahasan revisi UU Pemilu," ujar Khozin dalam keterangannya, Jumat (30/1/2026).

Politikus PKB itu mengatakan, polemik ambang batas parlemen bukanlah isu utama dalam menghadapi Pemilu 2029. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.116/PUU-XXI/2023 menitikberatkan pada persoalan proporsionalitas pemilu dan

semangat menyederhanakan partai politik.

"Isu utamanya soal sistem pemilu yang proporsional agar suara pemilih tidak hilang dan semangat penyederhanaan partai politik," ucapnya.

Dia menilai, sistem pemilu yang proporsional tidak bisa diwujudkan hanya dengan menghapus PT. Diperlukan berbagai mekanisme teknis agar suara pemilih tetap dapat terkonversi secara optimal. Seperti soal penghitungan, agar suara pemilih yang tidak dapat dikonversi ke kursi di dapil tetap bisa dihitung di tingkat provinsi.

Terkait wacana pembatasan pembentukan fraksi di DPR, dia menilai, hal tersebut bukan solusi ideal untuk mengatasi dampak penghapusan ambang batas parlemen. "Karena itu justru makin mengaburkan ideologi partai, fragmentasi di parlemen juga tetap akan tampak," katanya.

Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menambahkan, ambang batas parlemen masih dibutuhkan untuk membangun



Muhammad Khozin

sistem kepartaian yang sehat dan berkelanjutan. Parpol sehat adalah partai yang terlembaga secara kuat. Kelembagaan itu tercermin dari struktur organisasi yang solid, basis pemilih yang jelas, serta ideologi konsisten.

"Salah satu ciri dari partai politik yang terlembaga adalah memiliki basis akar suara dan ideologi yang kuat," kata Rifqi.

Keberadaan ambang batas, sambungnya, mendorong partai untuk terus membenahi diri. Partai dipaksa memperkuat struktur,

kaderisasi, dan basis dukungan agar mampu lolos ke parlemen. Selain itu, ambang batas juga penting menjaga efektivitas pemerintahan. Terlalu banyak partai di parlemen berpotensi melemahkan fungsi *checks and balances*.

"Memang ada kerugian dari PT, suara-suara yang tidak masuk itu tidak bisa terkonversi ke kursi. Tapi itu konsekuensi upaya mematangkan demokrasi keterwakilan," ucap politikus Partai NasDem itu.

Menurut Rifqinizamy, penyederhanaan partai politik melalui PT akan terjadi secara alamiah. Sistem akan mendorong partai menjadi lebih profesional dan terinstitusionalisasi. "Izinkan kami nanti mensimulasikan soal PT ini dalam pembahasan RUU Pemilu di Komisi II," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno menyatakan dukungannya terhadap penghapusan ambang batas parlemen. Ketentuan itu dinilai membatasi penyaluran aspirasi masyarakat. Sejak awal, PAN

termasuk partai yang konsisten mendorong penghapusan ambang batas, baik untuk Pilpres maupun pemilihan legislatif.

Menurut Eddy, jutaan suara pemilih kerap terbuang karena partai yang didukung gagal menembus ambang batas parlemen. Kondisi itu dinilai bertentangan dengan prinsip keterwakilan. "Itu jumlahnya tidak kecil, belasan juta," ujarnya.

Sebagai solusi, Eddy mengusulkan pembentukan fraksi gabungan bagi partai-partai dengan perolehan suara kecil. Skema ini dinilai mampu menjaga keterwakilan politik tanpa harus memperbanyak jumlah fraksi di parlemen. Partai yang belum memenuhi syarat kursi diarahkan untuk bergabung dalam satu fraksi bersama.

Eddy menilai, lewat mekanisme itu jumlah fraksi tetap terkendali, dan di saat yang sama aspirasi pemilih partai kecil tetap tersalurkan. Supaya masyarakat yang memilih partainya masih bisa menyalurkan aspirasinya melalui DPR. ■ PYB